



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

LAPORAN KINERJA

Deputi Bidang Akuntan Negara

2018



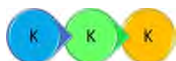
Nomor: Lap-01/D4/02/2019

2 Januari 2019

KATA PENGANTAR

Program Nawacita yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini telah memasuki tahun ke 4 dari periode 2015-2019. Dengan program Nawacita diharapkan dapat mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian, salah satu upaya yang dilakukan adalah mewujudkan kedaulatan di sektor energi yang cukup berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain dengan pengembangan sumber-sumber energi primer, kedaulatan energi akan lebih kokoh dalam hal pengelolaan korporasi dapat dikendalikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Aksi-aksi korporasi strategis yang dilakukan BUMN Migas dan pertambangan, baik yang bersifat organik maupun anorganik merupakan salah satu upaya dalam mendukung pengembangan kedaulatan energi. BPKP perlu mengantisipasi dinamika tersebut dengan kesiapan untuk berkontribusi dalam mengawal proses tersebut agar berada dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik. Kemandirian ekonomi perlu didukung dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. BUMN sebagai bagian komponen penggerak ekonomi, memiliki peran yang cukup strategis dalam pembangunan saat ini. Selain memberikan kontribusi langsung melalui deviden yang dibagikan kepada negara, beberapa BUMN mendapatkan amanah untuk melaksanakan proyek/program strategis nasional, terutama pembangunan infrastruktur. Meningkatnya belanja modal dan operasional BUMN, perlu dibarengi dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk didalamnya penyelenggaraan kegiatan dengan dukungan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko yang memadai. Dengan tata kelola yang baik, selain mendorong efisiensi dan efektivitas operasional, juga akan diperoleh pemenuhan ketaatan dan perlindungan yang memadai atas aset perusahaan. Selain itu, penugasan kepada BUMN dalam pelaksanaan proyek strategis nasional perlu didukung dengan pengawalan yang cukup, mulai dari perencanaan sampai dengan penyelesaiannya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Keuangan Negara/Daerah dan Pembangunan Nasional, termasuk pengawasan atas BUMN/BUMD. Selain itu, dalam mendukung keberhasilan pembangunan proyek strategis nasional, BPKP mendapat tugas untuk mengawal percepatan proyek strategis nasional sebagaimana dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.



Melanjutkan program tahun sebelumnya, pada tahun 2018 Deputi Bidang Akuntan Negara telah melaksanakan kegiatan pemantauan pembangunan proyek yang merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional, yaitu untuk program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, kilang minyak, smelter, Ketahanan Pangan, KUR, dan Jalan Tol. Selain pengawasan PSN, Deputi Bidang Akuntan Negara juga melaksanakan pengawasan terhadap tata kelola pelaksanaan kegiatan di BUMN, BUMD, BLUD dan pengawasannya terhadap BUMDes. Bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Akuntan Negara dapat dikelompokkan dalam bentuk *assurance* dan *consulting*. Kegiatan *assurance* meliputi audit bagi hasil migas, audit dengan tujuan tertentu, reviu atas asersi, reviu pengadaan barang dan jasa, *assessment* GCG atas BUMN/BUMD/Badan Usaha Lainnya. Kegiatan *consulting* untuk perbaikan tata kelola BUMN/BUMD/Badan Usaha Lainnya dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, penyusunan dan implementasi sistem informasi akuntansi (SIA), dan pemberian jasa manajemen lainnya. Pengembangan secara terus menerus juga dilaksanakan untuk meningkatkan layanan jasa manajemen yang mencakup *Good Corporate Governance*, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian/Lembaga dan Korporat, SIA PDAM, dan SIA BLUD. Pemberian jasa tersebut merupakan kegiatan dominan yang dilaksanakan selama tahun 2018 sebagaimana tercermin dalam laporan kinerja ini.

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas asesmen GCG yang dilakukan oleh BPKP, pada tahun 2018 telah dilakukan *up-grading* manajemen mutu asesmen GCG dari ISO 9001:2008 ke ISO 9001: 2015. Dengan *up-grading* tersebut kegiatan asesmen GCG akan berbasis risiko. Hal ini sejalan dengan program BPKP yang menjalankan pengawasan internal berbasis risiko. Selain itu, mulai tahun 2018 terdapat kegiatan evaluasi atas Kapabilitas Satuan Pengawas Internal pada sektor korporasi yang diharapkan pengawas internal lebih optimal dalam mengawal operasional perusahaan.

Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang diemban, Deputi Bidang Akuntan Negara menyusun Laporan Kinerja Tahun 2018 yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Rencana Strategis 2015-2019 serta Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Akuntan Negara tahun 2018. Laporan ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja tahun 2018, analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja. Sebagai pendukung, hasil survei kepuasan layanan Kedeputusan Bidang Akuntan Negara juga disajikan sebagai masukan peningkatan kinerja di tahun mendatang.



Disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dari Deputi Bidang Akuntan Negara kepada *stakeholders*, dan wujud penerapan tata pemerintahan yang baik, penyampaian informasi kinerja ini diharapkan pula menjadi landasan pelaksanaan rencana strategis 2015-2019, dan sarana pendorong bagi unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Akuntan Negara untuk secara berkelanjutan meningkatkan kinerjanya.

Semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 2 Januari 2019

Deputi Kepala BPKP
Bidang Akuntan Negara, *♩*



Bonny Anang Dwijanto
NIP 19600825 198703 1 001



Penyerahan Sertifikat
ISO 9001:2015
Asesmen Penerapan GCG
Pada BUMN





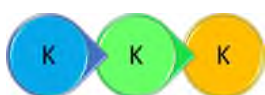
Pembahasan “Role, Responsibility, and Capacity Development”
Dengan Tim World Bank

DAFTAR ISI

	Halaman
	KATA PENGANTAR i
	DAFTAR ISI iv
	DAFTAR TABEL v
	DAFTAR GRAFIK vi
	DAFTAR GAMBAR vii
	DAFTAR LAMPIRAN viii
	IKHTISAR EKSEKUTIF ix
	BAB I PENDAHULUAN 1
	A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang 2
	B. Aspek Strategis 3
	C. Kegiatan dan Produk 11
	D. Struktur Organisasi 13
	E. Sistematika Penyajian 14
	BAB II PERENCANAAN KINERJA 16
	A. Rencana Strategis 17
	1. Pernyataan Visi 18
	2. Pernyataan Misi 18
	3. Tujuan dan Sasaran Strategis 20
	4. Indikator Kinerja Sasaran 21
	5. Program dan Kegiatan 22
	6. Sasaran Program 23
	7. Indikator Kinerja Program 23
	B. Perjanjian Kinerja 2018 25
	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27
	A. Capaian Kinerja 28
	B. Analisis Capaian Kinerja 31
	C. Realisasi Keuangan 73
	D. Survei Kepuasan <i>Stakeholder</i> 76
	BAB IV PENUTUP
	LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Sasaran	21
Tabel 2.2	Lingkup Kegiatan Deputi Bidang Akuntan Negara	22
Tabel 2.3	Target Kinerja 2015 - 2019	23
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Akuntan Negara 2018	25
Tabel 3.1	Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018 DAN	29
Tabel 3.2	Pencapaian Sasaran Program Tahun 2018 DAN	30
Tabel 3.3	Rekomendasi Hasil Pengawasan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional	42
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian dan Target Sasaran Program Tahun 2018	46
Tabel 3.5	Capaian BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG minimal "Baik"	49
Tabel 3.6	Capaian BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG minimal "Baik" 2015-2018	49
Tabel 3.7	BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A	52
Tabel 3.8	Capaian sasaran kinerja BUMD	56
Tabel 3.9	Capaian Sasaran Peningkatan Kinerja BLUD	58
Tabel 3.10	Anggaran dan Realisasi Tahun 2018 Deputi Bidang Akuntan Negara	74



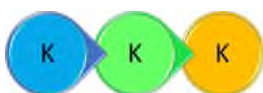
DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Sebaran BUMN Berdasarkan Sektor Usaha	4
Grafik 1.2 Nilai Aset, Liabilitas, dan Ekuitas BUMN	5
Grafik 1.3 Pendapatan, EBITDA, dan Laba Bersih BUMN	6



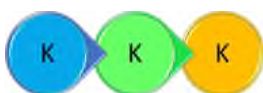
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Akuntan Negara	13
Gambar 1.2 Pola Pikir dan Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	15



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Lampiran 2	Target dan Realisasi Dana Tahun 2018
Lampiran 3	Target dan Realisasi Dana Tahun 2018 (5 Direktorat)
Lampiran 4	Target dan Realisasi Dana Tahun 2018 (34 BAN Perwakilan)
Lampiran 5	Target dan Realisasi SDM Tahun 2018
Lampiran 6	Daftar Skor Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern
Lampiran 7	Daftar Skor GCG BUMN/BUMD
Lampiran 8	Daftar Tingkat Kesehatan BUMN Tahun 2017
Lampiran 9	Tingkat Kesehatan BUMD Tahun 2018
Lampiran 10	Daftar Laporan Evaluasi Kinerja RSD BLUD Tahun 2017





**Rangkaian Kegiatan Kerja
Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara**

IKHTISAR EKSEKUTIF

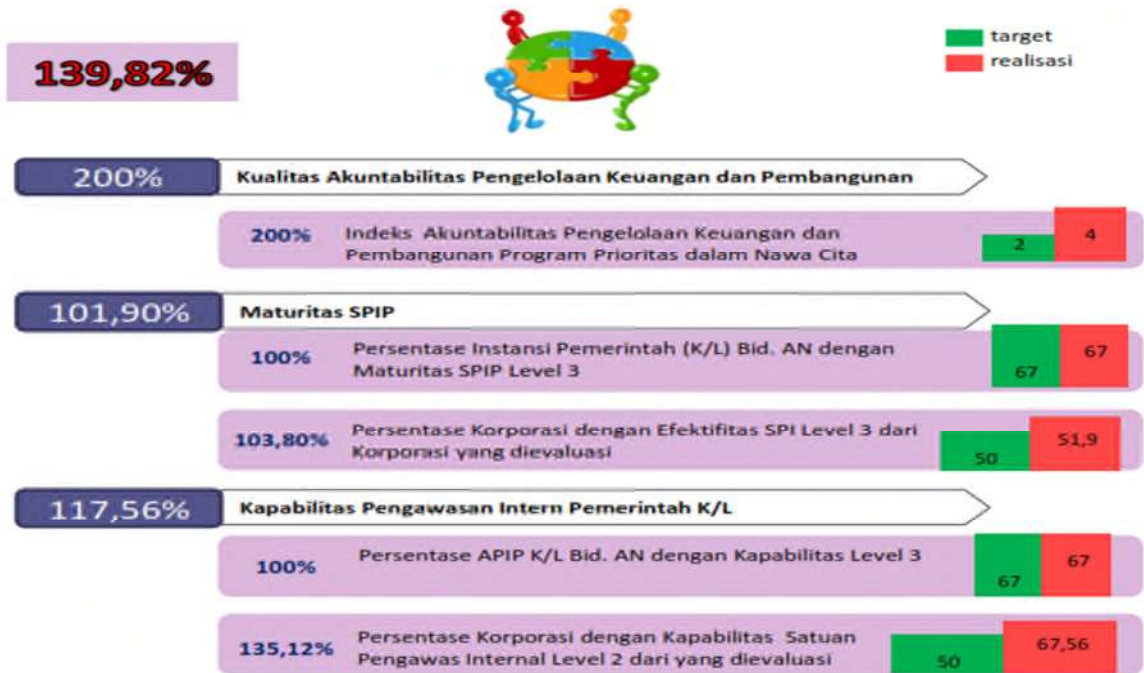
Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, BPKP harus senantiasa siap dalam mengemban amanah yang ditugaskan oleh Pemerintah. Dalam era kompetisi global, kecepatan dalam merespon perubahan lingkungan dan pengelolaan pemerintahan menjadi sangat penting. Upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan di berbagai sector termasuk pembangunan infrastruktur dan penetapan kebijakan pemerintah, dilakukan dengan sangat cepat dengan merespon perubahan yang terjadi di pasar global. Peran BPKP menjadi strategis untuk memastikan kecepatan gerak pembangunan juga diimbangi dengan tatakelola dan akuntabilitas pemerintahan yang baik. Berbagai penugasan pengawasan terhadap kegiatan lintas sektoral, kegiatan berdasarkan penugasan dari Presiden, dan kegiatan kebendaharaan umum negara atas penetapan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) harus dilakukan dengan cepat dan cermat.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas yang diemban, Deputi Bidang Akuntan Negara telah menetapkan indikator kinerja untuk tiga sasaran strategis dan tiga sasaran program pada tahun 2018, yang dituangkan dalam lima indikator sasaran strategis dan sebelas indikator program. Sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018, tiga sasaran strategis dapat dicapai seluruhnya berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran strategis, begitu pula dengan sebelas indikator kinerja sasaran program, seluruhnya dapat memenuhi target yang ditetapkan.

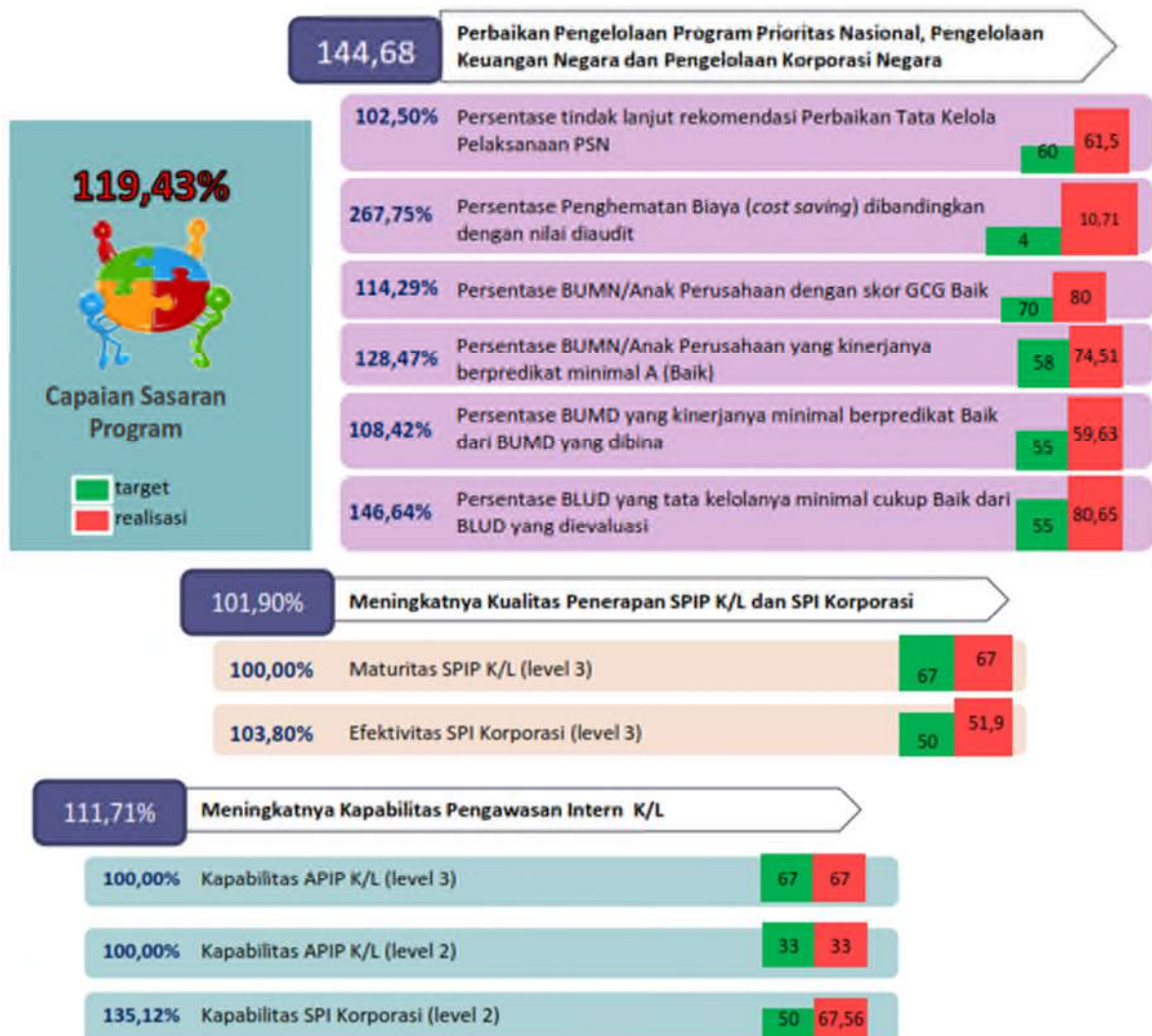
Kegiatan dalam mencapai sasaran strategis tahun 2018 sebagaimana telah ditetapkan, selain dilaksanakan oleh Deputi Bidang Akuntan Negara juga dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP, khususnya Bidang Akuntan Negara. Kegiatan tersebut didukung dengan sumber dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPKP dan Bantuan Kedinasan dari mitra kerja. Untuk DIPA Deputi Bidang Akuntan Negara tahun 2018 dari rencana sebesar Rp8.991.476.000,- direalisasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp8.778.803.900,- atau mencapai 97,63%. Sedangkan DIPA Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP, menyerap dana Rp14.104.628.611,00 dari anggaran Rp14.332.507.782,00.



Capaian Sasaran Strategis 2018



Capaian Sasaran Program Tahun 2018



Beberapa hal utama yang dilakukan dalam tahun 2018 oleh Deputi Bidang Akuntan Negara yaitu Pengawasan Program Strategis Nasional di Bidang Energi (migas dan kelistrikan-35.000 MW, 34 pembangkit terkendala, EBT), Transportasi dan Air Bersih (SPAM termasuk evaluasi kinerja PDAM), dukungan ketahanan pangan, Kontribusi pada kebijakan pemerintah terkait holding BUMN Migas, akuisisi aset strategis (Divestasi Freeport, akuisisi platform bisnis online), Pelaksanaan Evaluasi Kapabilitas SPI Korporasi (IACM based), peningkatan kontribusi ruang fiskal melalui audit *cost recovery* dengan pendekatan *Joint Audit* (BPKP, DJP dan SKK Migas), verifikasi subsidi bunga untuk perumahan, serta peningkatan tata kelola korporasi melalui asesmen GCG dan *updating* standar penilaian GCG melalui ISO 9001:2015,

Selain indikator kinerja, hal yang tidak kalah penting menunjukkan peran suatu unit kerja adalah kepuasan mitra kerja, yang secara tidak langsung dapat mencerminkan kecepatan, ketepatan, dan kualitas layanan yang diberikan oleh Deputi Bidang Akuntan Negara dan Bidang Akuntan Negara. Berdasarkan survey yang dilakukan, Skor Indeks Kepuasan *Stakeholders* Deputi Bidang Akuntan Negara Tahun 2018 adalah 86,36 dengan predikat “BAIK”. Hasil ini menunjukkan peningkatan sebesar 2,22 poin daripada hasil skor tahun sebelumnya sebesar 84,14.

Skor Indeks Kepuasan *Stakeholders* secara grafik digambarkan sebagai berikut:

